

Judul : Tim Istana Harus Sinkronkan Kebijakan  
Tanggal : Senin, 09 Januari 2017  
Surat Kabar : Seputar Indonesia  
Halaman : 2

## Tim Istana Harus Sinkronkan Kebijakan

Terbitnya PP 60/2016 Bukti Kecerobohan Pemerintah

**JAKARTA** - Polemik mengenai kebijakan kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor yang mengesankan adanya saling sanggah dan saling lempar di kalangan internal pemerintah harus disikapi serius.

Ke depan tim Istana dalam hal ini para menteri koordinator serta ring satu kepresidenan, yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Sekab), dan Kepala Staf Presiden (KSP) serta para staf khusus Presiden mesti menjamin agar semua kebijakan negara ketika sudah keluar ke publik terlebih dahulu telah dikordinasikan dan disinkronkan.

"Karena apa pun suatu kebijakan itu kan pasti sudah melalui pembahasan rapat dan sebagainya. Hanya persoalannya, ketika keluar ke publik, menko terkait dan pembantu Presiden di Istana harus memastikan semuanya sinkron. Apak buah harus jaga wibawa Presiden, jangan sampai Presiden diolok-olok hanya soal sepele, hanya soal karena tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi di kalangan pembantunya," kata guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, kepada KORANSINDO kemarin.

Komaruddin mengungkap, di era keterbukaan informasi dan media sosial yang begitu dinamis, masalah komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Jika itu tidak diperhatikan, setiap kebijakan negara akan ditangkap secara bebas oleh masyarakat. Padahal, harus disadari juga di era sekarang ini ada kepentingan politik kelompok tertentu yang menjadikan media sosial menyebarkan informasi yang tujuannya menjatuhkan wibawa pemerintah.

"Pak Jokowi kan orang kerja, Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) kan juga orang kerja. Timnya yang harus sinkronkan, tingkat menkunya, ting-

kat Istana-nya sehingga pemerintah tidak dirugikan," ungkapnya.

Menurut Komaruddin, di era sekarang ini jangan salah, sesuatu yang benar pun bisa menjadi simpang siur. "Di era banyak *hoax*, banyak *buzzer* yang sebar kebencian.



**"Anak buah harus jaga wibawa Presiden, jangan sampai Presiden diolok-olok hanya soal sepele, hanya soal karena tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi di kalangan pembantunya."**

KOMARUDDIN HIDAYAT  
Guru Besar  
UIN Syarif Hidayatullah

Memang ada pemalsuan berita untuk menjatuhkan orang. Makanya tim Istana, para pembantu Presiden harus menyadari itu, dievaluasi apa yang menjadi kelemahan agar masyarakat dan para pengusaha tidak dibingungkan," jelasnya.

Jika tim Istana tidak me-

nyadari pentingnya masalah komunikasi, ke depan akan selalu terjadi polemik yang akan merugikan pemerintah. Terlebih politik di Indonesia ketika memasuki era kompetisi selalu dibanjiri berita *hoax*.

"Dan mereka yang tidak suka pemerintah akan mudah sekali menerima dan menyebarkan berita *hoax*. Maka baiknya di Istana ada orang yang mestinya menyinkronkan semua kebijakan negara. Karena kalau tidak, yang kena atasnya. Enggak ada dalam suatu negara suatu kesalahan dialamatkan ke prajurit, pasti ke komandannya," tutur dia.

Seperti diketahui, kenaikan tarif pengurusan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri menjadi polemik karena adanya saling lempar mengenai siapa yang mengusulkan kenaikan. Antara Kementerian Keuangan, Polri, dan Presiden Jokowi tidak satu suara setelah publik merespons kebijakan kenaikan tersebut.

Setelah adanya respons negatif dan menjadi polemik di publik, pemerintah melalui Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, dan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar kemudian menyampaikan ke publik untuk meluruskan informasi yang telah membingungkan tersebut.

Teten, Boy Rafli, dan Askolani menjelaskan bahwa kenaikan biaya pengurusan/penerbitan STNK dan BPKB yang berlaku mulai 6 Januari 2017 tujuan utamanya adalah untuk peningkatan pelayanan publik. Kenaikan yang diatur dalam PP Nomor 60/2016 itu nantinya 92% dari hasil PNBP

institusi Polri akan masuk ke penerimaan negara yang kembali digunakan untuk pelayanan Polri kepada masyarakat.

Adapun mengenai awal usulan penyesuaian tarif, pemerintah mengklaim itu datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran DPR karena temuan di lapangan adanya kenaikan bahan material untuk STNK dan BPKB.

Dengan disertai rekomendasi BPK dan Badan Anggaran DPR, Polri mengusulkan hal tersebut ke Dirjen Anggaran Kemenkeu untuk membahas tarif PNBP tersebut dan kemudian diajukan PP tarifnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi menilai terbitnya PP Nomor 60/2016 yang memuat kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB, dan SIM memang menunjukkan kecerobohan dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menerbitkan aturan.

Menurut dia, adanya saling lempar tanggung jawab perihal usulan kenaikan biaya pengurusan dokumen kendaraan tersebut mencerminkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kemenkeu, kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya dalam menyusun peraturan.

Apalagi kemudian Presiden Jokowi malah mempertanyakan kenaikan biaya pengurusan dokumen kendaraan yang mencapai 300% dari tarif awal. "Ini yang menandakan ada yang tidak selesai dalam konteks komunikasi antar lembaga. Saya khawatir ada agenda dari masing-masing lembaga sehingga tidak ada transparansi dari mereka," ujarnya. "katanya

@rahmatshahid